

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pada 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) secara resmi menetapkan wabah penyakit Covid19 sebagai pandemi global(Putri 2020). Virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina pada akhir 2019 yang lalu, kemudian tidak lama setelah ditemukannya virus yang dikenal dengan sebutan nama Covid 19 ini menyebar tak terkendali dan menjangkit seluruh masyarakat di dunia dengan jumlah kasus kurang lebih 462 juta kasus positif, 394 juta jumlah pasien sembuh, dan jumlah kematian lebih dari 6 juta jiwa per maret 2021(Worldometer 2022).

Masuknya wabah Covid 19 di Indonesia diketahui sejak tanggal 2 Maret 2020. Pada waktu bersamaan Presiden Jokowi sendiri menginformasikan bahwa adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus Covid 19. Yang mana hal tersebut merupakan kasus pertama yang terinfeksi wabah. Hingga pada bulan Maret 2020 terdapat 32 provinsi yang melaporkan adanya kasus positif virus covid 19 yang terjadi di daerahnya(Indonesia 2022). Sejak saat itu media-media nasional, lokal dan internasional selalu gencar menginformasikan mengenai pemberitaan Covid-19. Dalam proses penanganan dan juga pemberitaan mengenai covid 19 banyak hal-hal yang tak terduga dan tak biasa sehingga hal tersebut berpengaruh pada perubahan sosial masyarakat. Hal ini membuat komunikasi saat masa-masa sulit merupakan bagian penting bagi seorang komunikator secara keseluruhan untuk mengatasi berbagai macam masalah terutama mengenai kesenjangan informasi, khususnya terkait pandemi Covid-19 dan juga penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap warga negaranya.

Komunikasi adalah praktik penyampaian informasi berupa data, situasi, kondisi, dan strategi yang akan dilakukan untuk keluar dari situasi

membahayakan yang sedang dihadapi dihadapi. Secara praktik komunikasi yang baik akan mendukung pencapaian tujuan guna keluar dari situasi yang sulit dikendalikan atau membahayakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah Indonesia masih kalah cepat dengan virus.

Melalui berbagai diskusi, tes uji coba dan kebijakan telah dilakukan untuk melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Seluruh daerah di negara Indonesia terdampak oleh adanya wabah Covid 19. Tak terkecuali bagi daerah kabupaten Subang.

Subang merupakan kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Subang terdiri dari 30 Kecamatan, 8 kelurahan, dan 245 Desa. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa secara keseluruhan daerah Kabupaten subang terdampak Covid 19, begitupula dengan daerah kecamatan Kasomalang. Kecamatan kasomalang menjadi salah satu daerah yang terdampak adanya wabah covid 19, tidak bisa dipungkiri bahwa semakin cepatnya penyebaran virus bisa jadi akan semakin berkembang pula masyarakat yang terinfeksi di kecamatan Kasomalang. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa kecamatan kasomalang dalam data bisa dilihat masih menjadi salah satu daerah yang terdampak positif Covid 19 nya lebih rendah daripada Kecamatan lainnya, berikut datanya.

Gambar 1.1

Update data Covid 19 di seluruh kecamatan kabupaten Subang tahun 2021



Sumber: subnag.go.id

Dapat dilihat dari data diatas bahwa diantara beberapa kecamatan di kabupaten Subang kecamatan kasomalang tidak menjadi salah satu daerah yang paling tinggi atau paling rendah yang terinfeksi Covid 19. Serupa dengan perkembangan kasus aktif yang mengalami penurunan di Daerah kecamatan Kasomalang, Turun nya jumlah kasus yang terjadi hal tersebut disebabkan karena langkah tegas dari Pemerintah Daerah kabupaten dalam melakukan penerapan kebijakan vaksin yang telah diperintahkan dari pemerintah pusat serta edukasi persuasif kepada masyarakat yang melibatkan semua unsur baik instansi pemerintah ataupun aparat penegakan keamanan seperti TNI/Polri dengan melakukan patroli dan memonitoring kegiatan masyarakat.

Selain dari penerapan beberapa kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya seperti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PSBB yang massif dilakukan oleh Pemerintah

Daerah kabupaten Subang upaya lain untuk terus berusaha guna memutus rantai wabah Covid 19 ini yaitu dengan program vaksinasi massal. Program vaksinasi massal di masa covid 19 merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam urusan yang bersifat wajib untuk menciptakan “Herd Immunity” di masa pandemi covid-19. Dan pada proses penerapan kebijakan setidaknya harus mencakup 70 persen vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat kabupaten Subang.

Oleh sebab itu dalam proses penerapan kebijakan vaksinasi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Subang komunikasi politik menjadi salah satu hal yang sangat harus diperhatikan. Berbicara mengenai komunikasi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Termasuk dalam kegiatan politik mempunyai peran yang sangat penting. Komunikasi tidak hanya sebagai penerus informasi dari suatu sumber yang kemudian disebarkan kepada publik, namun lebih mudah dipahami sebagai suatu hal yang dapat memunculkan kembali informasi oleh publik jika diberikan petunjuk seperti simbol, slogan, atau tema pokok. Sehingga komunikasi bisa juga dikatakan sebagai hubungan manusia antar manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan (*mutual understanding*).

Dimasa Covid 19 komunikasi sangatlah penting dilakukan, hal ini terjadi karena dalam proses penanganannya memerlukan partisipasi masyarakat untuk mendukung apapun yang menjadi kebijakan pemerintah dalam mencegah proses penyebaran Covid 19. Salah satu faktor pendukung dari suatu kebijakan adalah komunikasi politik. Komunikasi politik mempengaruhi seluruh aktivitas politik yang dilakukan oleh pemerintah dan aktor politik dalam kekuasaan negara dan proses tercapainya suatu tujuan.

Namun tidak bisa dipungkir tentu hal ini akan berpengaruh pada bahwa perubahan pola dan mekanisme komunikasi politik di pemerintah daerah dan juga jajarannya dalam proses pesan yang akan disampaikan

kepada masyarakat. Perubahan tersebut bisa terjadi pada komunikator, pesan dan ruang atau alat komunikasi yang digunakan. Pemerintah memutuskan untuk membeli vaksin dan menerapkan vaksin kepada masyarakat Indonesia yang kemudian kebijakan tersebut diterapkan kepada masing-masing pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Salah satu hal penting yang dilakukan pemerintah Daerah kabupaten Subang dalam proses komunikasi politik yang disampaikan kepada masyarakat salah satunya yaitu terus melakukan informasi terkait vaksinasi guna untuk mendapatkan kepercayaan terhadap masyarakat bahwa vaksinasi dilakukan merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam melaksanakan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan juga sebagai upaya agar terhindar dari virus covid 19.

Vaksinasi Covid-19 sendiri mulai dilaksanakan pada Januari 2021 dan diharapkan dapat menjangkau seluruh target sasaran secara bertahap. Agar pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan lancar dengan cakupan yang tinggi, maka diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dalam mendukung dan partisipasi dalam kegiatan vaksinasi Covid19, masyarakat membutuhkan informasi yang tepat dan benar mengenai vaksinasi Covid-19. Salah satu cara agar terpenuhi sasaran yang diharapkan pemerintah maka komunikasi politik yang disampaikan harus dilakukan secara efektif dengan strategi yang matang.

Berbicara mengenai pemanfaatan vaksinasi agar tidak salah dalam pemberian informasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa di pahami bahwa dalam *Corona Virus Tracker* yang dipublikasi pada The New York Times, menginformasikan bahwa terdapat lima tahap fase uji klinis vaksin sebelum akhirnya disetujui dan di terapkan kepada masyarakat. Disana dijelaskan bahwa, sebelum hal tersebut terjadi terdapat pengujian praklinis yang dilakukan oleh WHO. Ada beberapa tahapan dalam uji klinis vaksin yang mana pada pengujian praklinis, salah satu cara yang dilakukan adalah

vaksin baru pada sel dan hewan, seperti monyet atau tikus sebagai salah satu uji coba, yang mana hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah vaksin tersebut menghasilkan respons imun atau tidak dan apakah hal tersebut akan baik kepada tubuh manusia atau tidak. Apabila respons imun yang diharapkan memunculkan respon baik, maka vaksin akan melalui lima fase tersebut. Fase tersebut di antaranya adalah: Fase satu mengenai uji keselamatan, fase dua percobaan yang diperluas, fase tiga uji efisiensi, fase empat persetujuan dini atau terbatas, dan fase lima mengenai persetujuan.

Setelah melalui proses uji klinis Fase 3, maka dalam hal ini pemerintah mengatakan bahwa vaksin Covid-19 perlu segera diimplementasikan kepada masyarakat yang mana bertujuan sebagai tindakan pencegahan terhadap wabah covid 19. Bahkan, adanya upaya preventif ini juga merupakan salah satu respon semua negara yang memperjuangkan vaksin agar perekonomian bisa bangkit pesat dan seluruh masyarakat bisa pulih.

Disisi lain pada bulan Maret 2021, kasus virus Covid-19 di Kabupaten Subang menginjak babak baru dimana beberapa daerah telah terdeteksi virus Covid 19 yang mana jumlah kasus positif pun semakin hari semakin bertambah. Januari 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwa berdasarkan data menunjukkan tentang penambahan kasus Covid-19 yang masih terus meningkat. Hal tersebut tentu menjadi suatu ketakutan bagi masyarakat. Itu artinya pemerintah daerah belum sigap dalam menanggulangi permasalahan Covid 19 ini. Yang menjadi pertanyaan apakah salah satu faktor tersebut disebabkan karena masalah kurang efektif nya komunikasi politik yang dilakukan pemerintah Subang dalam program vaksinasi Covid 19, seharusnya itu menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dalam proses menangani wabah Covid-19. Bukan hanya hal tersebut yang menjadi faktor tapi kurangnya sosialisasi informasi terkait beberapa isu, kurang akuratnya

data dan informasi, bisa menjadi pengaruh yang berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.

Keberhasilan komunikasi politik yang digunakan oleh pemerintah kecamatan Kasomalang seharusnya dijadikan sebagai salah satu acuan dalam keberhasilan program vaksinasi, sebagaimana yang diinginkan Presiden Joko Widodo bahwasanya pemerintah daerah yang kemudian berkoordinasi dengan setiap kecamatan kabupaten/kota tidak boleh menerapkan kebijakan secara masing-masing yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah serta protokol kesehatan dan perhatikan strategi seperti apa agar program vaksin yang diterapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Komunikasi politik yang efektif tentunya menjadi salah satu cara dalam keberhasilan program vaksinasi karena dalam hal tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Komunikasi eksternal kelompok atau suatu organisasi menjadi salah satu ruang komunikasi yang dilakukan pemerintah untuk mengatur masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dengan partisipasi di satu sisi lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat atau lembaga ekonomi untuk menerima informasi dari pemerintah sebagai pengambil keputusan dan mengetahui . efek dari administrasi. Sebuah kebijakan pemerintah yang kemudian merilis informasi tersebut ke public (Silalahi, 2004).

Melalui pesan yang akan disampaikan komunikasi memiliki peran dan fungsi komunikasi yang sangat penting dan mempengaruhi terutama tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Subang tentang vaksinasi. Dalam proses interaktif yang bertujuan mengedukasi masyarakat, komunikasi yang efektif tentunya sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Media massa membicarakan tentang vaksinasi, yang gencar dilakukan oleh pemerintah kabupaten subang kepada masyarakat,

mulai dari informasi tentang pencatatan vaksinasi, pencegahan berita bohong tentang vaksin dan sosialisasi vaksin.

Secara keseluruhan komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan berisi politik kemudian disampaikan dari satu sumber kepada penerima sebagai bentuk informasi. Penyampaian pesan politik bisa dilakukan secara verbal maupun nonverbal yang nantinya dapat mempengaruhi masyarakat ataupun pemerintah didalam sebuah sistem politik. Dilihat dari pemaknaan komunikasi politik itu berarti pemerintah kecamatan kasomalang seharusnya sudah bisa melakukan komunikasi penyampaian informasi kepada masyarakat terkait berita atau bahkan data-data mengenai Covid 19.

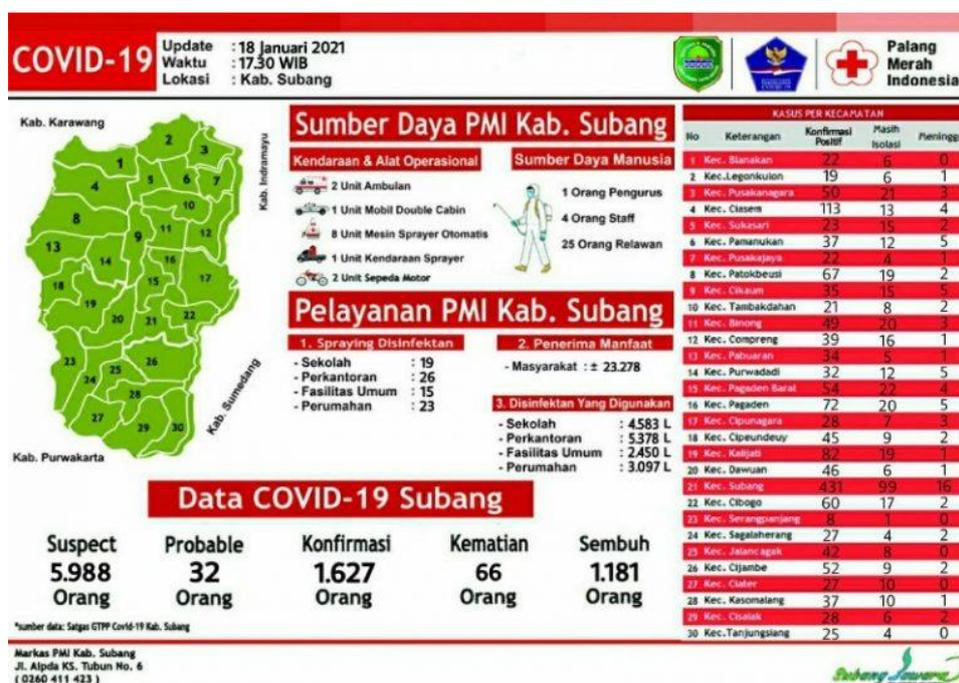
Komunikasi politik Menurut Michael Rush dan Philip Althoff berpendapat bahwa komunikasi politik adalah proses pemindahan informasi politik yang relevan dari satu bagian sistem politik ke bagian lain dan antara sistem sosial dan sistem politik. Proses ini berlangsung dan mencakup pola pertukaran informasi antara individu dan kelompok di semua bidang. Berbeda dengan Rusadi Kantaprawira, ia lebih memfokuskan kegunaanya pada komunikasi politik, yaitu integrasi gagasan politik yang hidup dalam masyarakat serta pemikiran kelompok internal, lembaga, perkumpulan atau bidang kehidupan politik masyarakat ke dalam bidang kehidupan politik pemerintah. (M. R. & P. Althoff. 1997)

Namun, tidak bisa dipungkiri pula bahwa masalah di kabupaten Subang bahkan kecamatan Kasomalang dihadapkan pada beberapa alasan *Pertama*, karena alasan keyakinan agama, ketidakpercayaan terhadap kehalalan vaksin Covid-19. Berdasarkan data nasional dari Survei Penerimaan Vaksin Covid-19 di Indonesia, penolakan vaksin dengan alasan agama memiliki porsi paling sedikit, yaitu sekitar 8 persen. Namun, di kecamatan Kasomalang hal ini menjadi kendala yang cukup signifikan. Lambatnya program vaksinasi yang terjadi di kabupaten Subang memerlukan dukungan salah satunya dari pemuka agama setidaknya untuk memberikan pemahaman sehingga dapat mempercepat cakupan vaksinasi.

*Kedua*, kekhawatiran terhadap efek samping vaksin, karena di kabupaten Subang sendiri masih banyak informasi-informasi yang belum jelas tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menyimpulkan sendiri bahwa vaksin memiliki efek samping yang berbahaya. *Ketiga*, banyaknya beredar berita bohong (hoax) di media sosial tentang vaksin, hal ini tentu mempengaruhi pandangan masyarakat. *Keempat*, antusias masyarakat kecamatan Kasomlang untuk melakukan vaksinasi masih sangat minim. *Kelima*, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurang maksimalnya upaya sosialisasi dan edukasi yang dipeberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Upaya sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap bahaya Covid-19 dan pentingnya untuk melakukan vaksinasi. Itu artinya komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah subang belum mencapai pada puncak efektif.

Berdasarkan tujuan bahwa dengan program vaksinasi yang bertujuan untuk membangun (*herd immunity*) serta salah satu cara yang utama dalam penanganan penyebaran Covid-19. Andriadi dkk. (2021:102), mengatakan bahwa vaksin menawarkan manfaat dan tujuan penting bagi semua masyarakat. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa banyak masyarakat berkenan untuk melakukan vaksinasi mereka berpandangan berdasarkan pada manfaat, banyak diantara mereka percaya bahwa dengan melakukan vaksinasi selain bertujuan karena ingin membantu pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi dan mencapai *herd immunity*, disisi lain banyak diantara mereka percaya program vaksinisasi yang diberikan pemerintah merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap rakyatnya, serta meyakini bahwa dengan adanya vaksin masyarakat akan lebih terlindungi dari penyebaran Covid 19. (Octafia 2021)

**Gambar 1.2**  
**Awal Kasus Covid 19 Di kabupaten Subang**



Sumber: Subang.medikom.online

Dari data diatas dapat terlihat jelas bahwa kasus positif Covid-19 di Kabupaten Subang, saat ini bertambah 26 orang. “Dengan adanya penambahan data 26 orang yang positif terpapar Covid-19 tersebut, jumlah total keseluruhan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Subang menjadi 1.627 orang,” menurut Satgas Covid-19 Kabupaten Subang, Komara, Senin (18/1/2021).

Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Subang hari ini ada penambahan sebanyak 26 orang, yaitu tiga orang dari Kecamatan Pagaden, satu orang dari Kecamatan Pusakanagara, satu orang dari Kecamatan Kasomalang, satu orang dari Kecamatan Binong. Kemudian satu orang dari Kecamatan Cibogo, satu orang dari Kecamatan Kalijati, dua orang dari Kecamatan Sukasari, delapan orang dari Kecamatan

Pagaden Barat, dan delapan orang dari Kecamatan Subang. Data selanjutnya mengenai data perkembangan covid 19 yang terjadi di kabupaten Subang.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kabupaten Subang**

<b>UPDATE DATA COVID-19 KABUPATEN SUBANG</b>	
<b>KAMIS, 11 MARET 2021 (PUKUL 20.00)</b>	
Kontak Erat 937 Orang	
973 Selesai	0 Belum Selesai
Suspect 6.089 Orang	
Selesai Discarded: 338 Orang	Selesai Pemantauan: 5.704 Orang
Belum selesai: 47 Orang	
Probable 32 Orang	
Pelaku Perjalanan 0 Orang	
Konfirmasi 3.570 Orang	
Selesai Isolasi	Masih Isolasi
2.740 Orang	742 Orang
Kematian 88 Orang	

Sumber: Subang.com

Selanjutnya pada awal 2021 pemda menyebutkan ada 60 kasus positif baru orang yang positif terpapar Covid-19, sehingga menjadikan total kasus positif tercatat sebanyak 3.570 kasus, yang selesai isolasi 2.740 orang, yang masih isolasi 742 orang dan yang meninggal 88 orang (Subang.com).

Berdasarkan fakta di atas yang menunjukkan bahwa jumlah kasus Covid-19 terus meningkat, jelas bahwa membeli vaksin dan mendapatkan vaksin Covid-19 memang merupakan cara yang paling masuk akal untuk memutus mata rantai penularan. Namun bagaimana tanggapan masyarakat terhadap upaya pemerintah untuk membeli vaksin yang masih dalam uji

klinis? Oleh karena itu, pada akhir Oktober 2020, Kementerian Kesehatan RI menerbitkan hasil studi bersama Indonesian Technical Group on Immunization (ITAGI) tentang reaksi masyarakat terhadap “rencana peluncuran vaksin Covid-19”. Menurut survei, 64,8% penduduk ingin divaksinasi, 7,6% menolak dan 26% masih ragu.

Semua orang setuju bahwa vaksinasi sangat penting. Pemerintah juga gencar mensosialisasikan pentingnya vaksinasi ini untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-19. Tapi kenapa masyarakat tidak maksimal? Jika asumsikan 99% (plus minus OE ketika menggunakan sampel 1% - asumsi penulis) ingin divaksinasi untuk menunjukkan bahwa tidak ada resistensi di kalangan masyarakat Indonesia dan meragukan niat pemerintah untuk menghentikan pemberian vaksin Covid -19? Bukankah masyarakat masih relatif yakin bahwa vaksin akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan Covid-19? Apakah cara komunikasi yang digunakan pemerintah setempat tidak meyakinkan masyarakat kecamatan Kasomalang? Atau semua ini berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang lemah. Maka dalam hal ini peran komunikasi politik sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kecamatan kasomalang, tentunya penting bahwa vaksin merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat sehingga cukup sulit bagi masyarakat untuk menerimanya. Meskipun ini adalah cara untuk menghindari Covid-19, tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan model komunikasi sangat penting dalam hal ini (Akbar 2021).

Kabupaten Subang sendiri menggunakan vaksin Sinovac dan ini dianggap sebagai salah satu vaksin China yang mengalahkan vaksin lainnya. Menurut Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir, menjelaskan bahwa vaksin Sinovac membutuhkan berbagai aspek, antara lain keamanan, kecepatan, dan kemandirian sebelum diberikannya kepada masyarakat. Untuk alasan keamanan, vaksin ini telah melalui serangkaian uji (uji klinis pra-klinis level 1, 2 dan 3). Peralnya, vaksin asal China ini dinyatakan sebagai salah satu vaksin yang mendapatkan popularitas

dengan predikat kelas satu dari WHO. Bersama dengan beberapa dari 10 kandidat vaksin teratas dalam hal kecepatan, Sinovac adalah yang tercepat memasuki bagian 3 dari studi ilmiah. Sementara itu, dalam rangka kemandirian dengan jumlah vaksin yang diinginkan, tidak bisa dipenuhi jika hanya menunggu dari luar, PT. Bio Farma melakukan alih generasi dan mendukung kemandirian negara untuk memproduksi vaksin jenis Sinovac yang kemudian menawarkan vaksin Covid-19 kepada masyarakat Indonesia.

Dilihat dari proses pendistribusian vaksin tahap pertama, Kabupaten Subang menerima sebanyak 7.800 dosis yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan TNI/POLRI dan sepuluh orang penerima pertama termasuk Bupati Subang dan jajaran Forkopimda Kabupaten Subang. Tentunya hal ini menjadi sebuah kunci bagi Pemerintah Daerah kabupaten Subang dalam pencapaian target yang akan disampaikan melalui komunikasi politik yang dilakukan oleh Pemerintahan melalui baik itu secara langsung maupun melalui media sosial.

Salah satu keberhasilan pemerintah terkait program yang akan dijalankan tentunya perlu melibatkan partisipasi dari masyarakat sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu, perlu adanya strategi yang tepat dalam berkomunikasi khususnya terkait dengan program vaksinasi Covid 19. Sebagaimana diketahui program vaksinasi ini masih menimbulkan pro dan kontra, ada masyarakat yang bersedia dan bahkan banyak masyarakat yang engga untuk di vaksin. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, adanya beberapa informasi yang sulit dimengerti karena banyaknya berita keliru atau disinformasi dan misinformasi yang beredar mengenai pemberian vaksinasi Covid-19. Tidak sedikit juga yang meragukan kemampuan vaksin Covid-19 serta belum bersedia melakukan vaksinasi Covid-19. Solusi permasalahan yaitu dengan manajemen sosialisasi pentingnya vaksinasi Covid-19 terus-menerus di kalangan masyarakat sehingga dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan masyarakat terkait vaksinasi Covid-19. Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap vaksinasi ikut mempengaruhi jumlah cakupan vaksinasi itu sendiri, sehingga masyarakat merasa enggan untuk di vaksin bahkan terdapat penolakan di beberapa daerah di Indonesia.

Kualitas informasi yang akan disampaikan oleh pemerintah Daerah kabupaten Subang khususnya pemerintah kecamatan Kasomalang tentunya akan menimbulkan reaksi dan respon masyarakat terhadap pesan yang akan disampaikan. Informasi terhadap ajakan vaksin dan edukasi vaksin, Adapun menurut Mc. Leod dalam (Darwis & Rizal, 2015), bahwa komunikasi politik yang berkualitas apabila akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap ketika informasi tersebut hendak akan disampaikan. Sebab dalam menyampaikan sebuah informasi terutama di media social khususnya facebook dan instagram memiliki pembentukan citra bagi sebuah organisasi perangkat daerah yang berperan.

Maka tulisan ini kemudian akan mengeksplorasi apakah efektif komunikasi politik yang dilakukan pemerintah Kecamatan Kasomalang dalam program vaksinasi Covid 19 tahun 2021 yang dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Kasomalang. Sehingga program vaksin tersebut bisa dilakukan tanpa adanya permasalahan-permasalahan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Komunikasi Politik Pemerintah Daerah dalam Program Vaksinasi Covid 19 Tahun 2021 (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi komunikasi politik Pemerintah Kecamatan Kasomalang dalam program vaksinasi kepada masyarakat kecamatan Kasomalang?

2. Bagaimana efektivitas komunikasi politik pemerintah kecamatan Kasomalang dalam program vaksinasi Covid 19?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana strategi komunikasi politik Kecamatan Kasomalang yang di berikan Pemerintah dalam program vaksinasi kepada masyarakat Kecamatan Kasomalang
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas komunikasi politik pemerintah kecamatan Kasomalang yang diberikan dalam program vaksinasi Covid 19.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat yang di peroleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi para peneliti
    - 1) Jika tujuan di atas tercapai, penelitian ini akan membandingkan mahasiswa ilmu politik dengan mahasiswa lain yang memiliki minat yang sama dalam menganalisis apa yang sedang terjadi di suatu negara, dan daerahnya masing-masing, seperti tentang seberapa efektif kah komunikasi politik yang ddilakukan pemerintah kota Subang dalam program vaksinasi Covid 19 tahun 2021 yang dilakukan kepada masyarakat Subang khususnya Kecamatan Kasomalang.
    - 2) Penulis berharap agar hasil penelitian dapat memberikan masukan ke setiap elemen yang tertarik dengan membahas topik yang sama atau terkait.
    - 3) Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber relevansi terkait komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam suatu penerapan program.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hal tersebut dapat menjadi salah satu pembahasan mengenai informasi yang mana nantinya dapat dikembangkan ke berbagai aspek peneliti kemudian dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti dalam mengetahui seberapa efektifkah komunikasi politik yang dilakukan pemerintah daerah dalam penerapan program vaksinasi Covid 19 tahun 2021 kepada masyarakat Subang khususnya Kecamatan Kasomalang.

## E. Kerangka Berpikir

Uma Sekaran (1992) menjelaskan bahwa kerangka adalah sebuah versi konseptual cara atau ide berkaitan dengan faktor yang berbeda yang telah diakui sebagai isu penting. Kerangka berpikir adalah bukti dari tanda-tanda yang menjadi objek masalah. Kerangka berpikir bisa diartikan juga sebagai model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah (Mahmud 2011).

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir yang dilakukan untuk mengetahui apakah efektif komunikasi politik yang dilakukan pemerintah

Kecamatan Kasomalang dalam program vaksinasi 2021 yang terjadi pada masyarakat kecamatan Kasomalang. Penulis menerapkan teori komunikasi politik dan juga partisipasi masyarakat yang menjadi fokus utama penelitian ini. Komunikasi yang efektif dalam suatu pembuatan kebijakan politik yang akan diimplementasikan kepada publik maka permasalahan yang terjadi didalam suatu negara atau pun daerah dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat melalui koordinasi yang baik antar tiap bidang dalam suatu daerah. Daerah yang berhasil dan berkembang bisa dilihat dari efektifnya komunikasi politik yang dilakukan pemerintah dalam suatu pengimplementasian kebijakan sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan daerah akan mudah untuk tercapai (Rinaldy 2016).

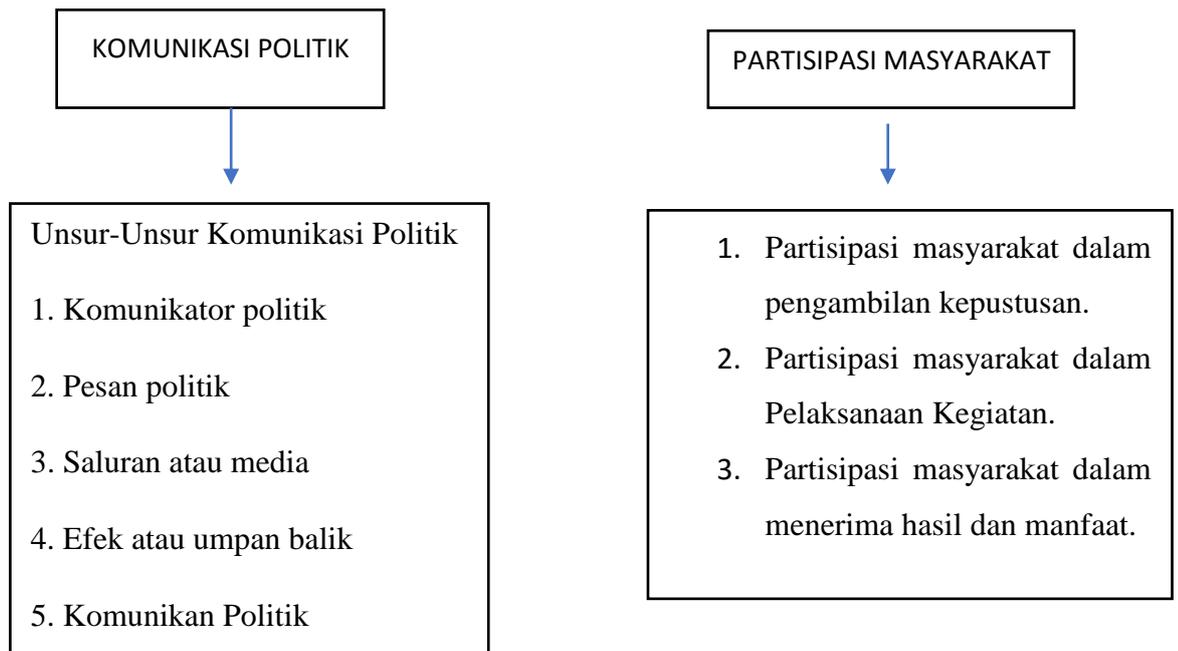
Plano (dalam Mulyana, 2007:29) menjelaskan bahwa “komunikasi politik merupakan suatu proses penyampaian pesan, yang didalamnya berisi makna yang berhubungan dengan fungsi dan sistem politik”. Hal tersebut bisa dikatakan menjadi sebuah tantangan keberhasilan pemerintah daerah untuk menyelesaikan wabah Covid 19 dengan caranya mengadakan program vaksin yang sudah dianjurkan oleh negara Indonesia bahwa setiap masyarakat harus melakukan vaksinasi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah jelas berdasarkan anjuran Kesehatan. Hal tersebut sangat menentukan tingkat atraktivitas dan tingkat efektivitas program vaksin yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga adanya komunikasi politik yang efektif sangat berpengaruh untuk mewujudkan tujuan dan hasil yang bersifat politik (Amelianti 2021).

Michael Rush dan Philip Althoff berpendapat bahwa “komunikasi politik adalah proses dimana informasi politik yang signifikan dan jelas ditransmisikan dari satu bagian sistem politik ke bagian lain diseluruh sistem sosial dan politik”. Jadi dia berpendapat bahwa proses ini berlanjut dan menggunakan cara pertukaran informasi antara individu dan kelompok di semua tingkatan (R. dan Althoff 1997).

Begitu pula yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kasomalang dalam proses komunikasi politik yang disampaikan kepada masyarakat seluruh masyarakat Kecamatan Kasomalang kemudiann dalam proses program vaksinasi yang diterapkan pasti memiliki strategi dalam komunikasi yang disampaikan agar masyarakat mampu menerimanya dengan baik melakukan anjuran pemerintah sebagaimana mestinya.

## 1. Skema dan Alur Penelitian

Adapun skema alur dalam penelitian ini adalah:



Konsep diatas menjelaskan bahwa negara Indonesia yang kemudian memerintahkan kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah agar melakukan kerjasama dalam program vaksin yang mana vaksin ini pada awalnya dari China yang kemudian menjualnya ke beberapa negara begitupula dengan negara Indonesia dari negeri diberikan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan wabag Covid 19 sehingga dari adanya kerjasama tersebut pemerintah khususnya Kabupaten Subang dapat mengetahui apakah efektif komunikasi politik yang dilakukan sehingga masyarakat Subang khususnya Kecamatan Kasomalang dapat menerima program vaksin dengan baik.

## 1. Komunikator Politik

Komunikator politik mengacu pada orang-orang yang menguasai struktur kekuasaan, orang-orang yang berada dalam suatu lembaga, perkumpulan, partai, media massa yang menguasai lembaga, dan tokoh masyarakat. Komunikator politik juga dapat dipandang sebagai orang yang berkuasa dalam negara, organisasi internasional, dan orang yang ditunjuk atas nama negara. Begitupula dalam program vaksin lembaga-lembaga atau intitusi-intitusi seperti Dinas Kesehatan, Dinas sosial, tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain bekerjasama untuk mengefektifkan program vaksin Covid 19 ini kepada masyarakat agar lebih mudah untuk menerimanya, sehingga target vaksinasi di Kecamatan Kasomalang bisa tercapai.

## 2. Isi (pesan-pesan) Komunikasi Politik

Isi komunikasi (pesan) merupakan suatu capaian dari suatu lembaga setelah melakukan coding, maka dari itu isi pesan yang akan disampaikan sudah jelas secara simbol berdasarkan perintah lembaga atau pemerintah. Dalam hal ini tentunya isi pesan berhubungan dengan vaksin, yang mana pesan tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dalam prosesnya. Dilihat berdasarkan isi komunikasi terdiri dari:

- a. Sekumpulan aturan yang menentukan jalannya transformasi pesan.
- b. Pedoman dan aturan-aturan ideal yang bertujuan pada upaya mempertahankan serta melestarikan sistem nilai yang berkelanjutan.
- c. Beberapa metode untuk mengimplementasikan fungsi terintegrasi suatu sistem.
- d. Ciri-ciri yang menunjukkan identitas suatu bangsa.
- e. Motivasi adalah kekuatan fundamental yang dimulai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### 3. Media Komunikasi Politik

Media komunikasi menjadi pusat perhatian para aktor politik sebagai sarana untuk meraih kepercayaan masyarakat dalam proses pembuatan ataupun pengimplementasian kebijakan bukan hanya itu media juga bisa menjadi sumber kekuatan dalam meraih kekuasaan dengan memunculkan citra baik melalui saluran media yang dilakukan. Dalam sistem politik, terlepas dari bentuk sifat serta politiknya, sarana komunikasi memiliki tempat yang penting dalam mendefinisikan politik. Begitupula dengan daerah Subang bisa jadi pesan yang disampaikan lebih banyak menggunakan media daripada sosialisai secara langsung.

### 4. Efek atau Umpan Balik Komunikasi Politik

Dalam proses penyampaian pesan pentingnya strategi di lakukan untuk mengetahui seberapa berhasilkah umpan balik yang disampaikan. Terutama dalam program vaksin ini, apakah pesan yang disampaikan itu dirasa efektif atau tidak sehingga masyarakat mampu menerimanya dengan baik atau justru malah sebaliknya. Adapun macam-macam Umpan balik dari komunikasi politik diantaranya adalah:

A. Sosialisasi Politik, manusia tidak secara alami memiliki pandangan, cita-cita, atau kehormatan politik. Melalui komunikasi interpersonal, organisasi, dan massa, seorang anak mengembangkan kemampuan untuk menerima komunikasi yang penting secara politis.

B. Partisipasi Politik, orang memperoleh keyakinan, nilai, dan harapan politik melalui sosialisasi dalam politik. Tingkat sosialisasi politik yang diterima seseorang menentukan seberapa partisipatifnya mereka terlibat dalam politik.

### 5. Komunikan Politik (Khalayak)

Dalam penjelesan ini komunikan, atau pihak kepada siapa pesan-pesan politik dikomunikasikan, diartikan bahwa khalayak merupakan sasaran yang sebenarnya (penerima, khalayak). Akan tetapi, dari sudut pandang

para ahli komunikasi yang fokus pada komunikasi politik, komunikasi seringkali ditonjolkan ke publik atau publik yang lebih luas. Yang harus diperhatikan adalah, tergantung pada keadaan komunikator dan komunikasi yang mana dapat bertukar peran selama proses komunikasi.

